

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendanaan merupakan salah satu terpenting dalam berjalannya suatu perusahaan. Utang merupakan salah satu solusi untuk mendanai suatu perusahaan. Utang adalah sesuatu yang dapat dipinjam baik uang ataupun benda yang mengacu pada dana yang dipinjam oleh suatu perusahaan dari berbagai penyedia modal. Perusahaan meminjam dari lembaga - lembaga keuangan seperti bank, dalam bentuk pinjaman; peminjaman yang demikian disebut *utang swasta*. Selain itu perusahaan biasanya meminjam dari para investor dengan menerbitkan surat berharga seperti saham, obligasi dan peminjaman. Kebijakan hutang merupakan salah satu keputusan pendanaan yang sangat penting bagi perusahaan. Manajer selaku pengelola perusahaan harus memilih kombinasi sumber dana perusahaan dengan teliti karena setiap sumber dana memiliki konsekuensi finansial yang berbeda-beda, termasuk utang yang dirasakan lebih berisiko mengancam likuiditas perusahaan. Ketersediaan dana yang cukup bertujuan untuk membiayai kegiatan operasional yang merupakan salah satu faktor yang penting bagi semua perusahaan.

Kebijakan hutang merupakan kebijakan dalam menentukan dana perusahaan. Dalam mendanai kegiatan operasionalnya perusahaan dapat menggunakan dua alternatif pendanaan antara lain, pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Sumber dana internal berasal dari laba ditahan dan sedangkan untuk pendanaan eksternal bersasal dari kreditur. Pendanaan sendiri

merupakan komponen yang sangat penting didalam kelangsungan suatu perusahaan.

Pada tahun 2019 PT. Agung Podomoro Land (APLN) mendapat penurunan peringkat dari lembaga rating internasional. Kini, Fitch Ratings memangkas peringkat utang APLN dari B- ke CCC- terkait obligasi jangka panjang senilai US\$ 300 juta dengan kupon 5,95% per tahun yang diterbitkan anak usahanya. Manajemen APLN menyiapkan sejumlah cara untuk menurunkan tingkat risiko pembiayaannya. Penurunan peringkat ini disebabkan meningkatnya risiko pembiayaan kembali dan likuiditas APLN. Dimana asumsi ini muncul karena keterlambatan APLN dalam menerbitkan fasilitas pinjaman tahap 2 yang berdasarkan perjanjian fasilitas tersebut dan APLN akan mendapatkan dana sebesar Rp 2,6 triliun pada 24 Mei 2019, yang mana dana tersebut akan digunakan untuk membayar kembali semua pinjaman yang belum dibayar sejumlah Rp 1,178 triliun pada Juni 2019.

Pengambilan kebijakan pendanaan harus mempertimbangkan dan menganalisis sumber – sumber dana yang diperoleh. Kebijakan pendanaan sendiri harus bisa memaksimalkan kemajuan perusahaan. Perusahaan mempunyai tujuan utama yaitu untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan yang besar dan untuk meningkatkan nilai perusahaan di masyarakat. Manajemen berperan sangat penting dalam hal ini, apabila manajer salah mengambil keputusan maka akan mempengaruhi kegiatan operasional suatu perusahaan. Kebijakan hutang yang tidak stabil dapat mengakibatkan atau berdampak buruk bagi perusahaan tersebut dan akan memicu adanya kerugian

atau bahkan akan lebih fatal lagi seperti kebangkrutan. Kebijakan hutang merupakan kebijakan dalam menentukan dana perusahaan yang bersumber dari eksternal.

Penerapan akuntansi nilai wajar terhadap utang dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Bank yang telah benar-benar menyangdingkan daftar jatuh tempo asset dengan liabilitasnya akan memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang stabil. Perusahaan biasanya cenderung mendanai kembali utang yang jatuh tempo dengan pinjaman yang baru. Namun untuk perusahaan yang tidak sehat dalam keuangannya atau tidak mampu mendanai kembali hutangnya dan seringkali akan melakukan negoisasi dengan bankir untuk memperpanjang jatuh tempo, negoisasi tersebut akan melibatkan biaya yang signifikan, umumnya dalam bentuk suku bunga yang lebih tinggi atau pembayaran dengan berbagai penalti atau denda. Beberapa faktor yang memengaruhi kebijakan hutang antara lain ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan.

Ukuran perusahaan atau juga disebut dengan SIZE merupakan merupakan skala untuk menentukan seberapa besar atau kecilnya ukuran perusahaan yang dilihat dari berbagai cara yaitu total aktiva atau ukuran perusahaan digunakan untuk mengetahui besarnya jumlah alokasi untuk tiap komponen asset. Seperti yang dinyatakan oleh Elly Astuti (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang sedangkan peneliti lain seperti Dewi Purwasih (2014) dan M.Syaifudin Hidayat

(2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang.

Kepemilikan manajerial merupakan besaran proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen (direksi dan komisaris). Kepemilikan manajerial merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi kebijakan hutang. Hasil dari penelitian Dita Novita (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan hutang. Tetapi menurut peneliti Rizka Putri Indahnigrum (2009) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Kepemilikan institutional merupakan kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan dana pensiun dan institusi lainnya (Abdullah W.Djabid, (2011). Kepemilikan institutional dapat memantau para manajemen, sehingga pemegang saham akan terjamin untuk masa yang akan datang, pengawasan manajemen harus dilakukan secara baik dan terpantau sehingga dapat tercapainya semua tujuan yang diharapkan oleh para manajer. Pemantauan dan pengawasan tersebut harus bisa menjamin para manajer dalam kedepannya karena untuk menjamin para pemegang saham yang mana pemegang saham merupakan salah satu peran penting dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan institutional juga harus menekankan para investor melalui investasi mereka terhadap pasar modal. Dengan kepemilikan institutional yang tinggi maka akan timbul usaha pengawasan yang lebih baik oleh pihak investor dan perilaku

manajer dapat terkontrol oleh pemegang saham tersebut. Karena manajer adalah salah satu pihak yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam hasil penelitian (Elly Astuti, 2014) kepemilikan institutional tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Tetapi peneliti (Dita Nafia, 2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kepemilikan manajrial berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan hutang. Oleh karena itu perlu diadakan lagi penelitian lebih lanjut mengenai kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang.

Profitabilitas juga merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang. merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu. Menurut peneliti Dita Novita (2013) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang tetapi peneliti lain seperti Reza Ramadhany (2015) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Dalam hal ini maka perlu diadakannya lagi penelitian yang selanjutnya mengenai profitabilitas terhadap kebijakan hutang. Hasil dari penelitian diatas masih belum menunjukkan hasil yang konsisten antara peneliti satu dengan peneliti yang lain. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

Pertumbuhan penjualan merupakan keberhasilan investasi pada periode sebelumnya yang mempredisikan investasi di periode berikutnya dengan

melihat peluang pasar (Umi Mardiyanti,2018). Menurut peneliti Dita Novita (2013) pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Tetapi peneliti lain mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang yang dinyatakan oleh peneliti Lasmanita Rajaguguk (2013).

Dalam penjelasan diatas yang telah diuraikan pada paragraf diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Kebijakan Hutang.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil peneletian yang ada dan bukti empiris yang berbeda atau tidak konsisten, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap kebijakan hutang ?
2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap kebijakan hutang ?
3. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap kebijakan hutang?
4. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap kebijakan hutang ?
5. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap kebijakan hutang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis Ukuran Perusahaan terhadap kebijakan hutang.
2. Untuk menguji dan menganalisis Kepemilikan Manajerial terhadap kebijakan hutang.

3. Untuk menguji dan menganalisis Kepemilikan Institutional terhadap kebijakan hutang.
4. Untuk menguji dan menganalisis Profitabilitas terhadap kebijakan hutang.
5. Untuk menguji dan menganalisis Pertumbuhan Penjualan terhadap kebijakan hutang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi dan pengetahuan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang didalam perusahaan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi perusahaan

Dapat memberikan masukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan pendanaan perusahaan.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi disuatu perusahaan.